

# MILITARY INTELLIGENCE STRATEGIES IN RESPONDING TO SECURITY THREATS IN PAPUA

## STRATEGI INTELIJEN MILITER DALAM MERESPON ANCAMAN KEAMANAN DI PAPUA

Wing Sandya Udayanto <sup>1a(\*)</sup> Arifuddin Uksan<sup>2b</sup> Syaid Haryana<sup>3c</sup>

*-spasi-*

<sup>12</sup> DIKREG LII SESKO TNI TAHUN 2024

<sup>a</sup> [sandyawing99@gmail.com](mailto:sandyawing99@gmail.com)

(\*) Corresponding Author  
[sandyawing99@gmail.com](mailto:sandyawing99@gmail.com)

**How to Cite:** Wing Sandya Udayanto. (2024). Strategi Intelijen Militer Dalam Merespon Ancaman Keamanan Di Papua  
 doi: 10.36526/js.v3i2.4410

Received: 23-09-2024  
 Revised : 05-10-2024  
 Accepted: 15-11-2024

**Keywords:**

Strategy,  
 Intelligence,  
 Military,  
 Security,  
 Papua

**Abstract**

Papua faces a serious threat of terrorism, particularly from armed groups such as KKB, which are involved in various acts of violence. The background of this study aims to analyze military intelligence strategies in responding to security threats and their impact on community welfare. The research method employed is qualitative with a descriptive approach, utilizing interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that military intelligence strategies focus on mapping and early detection of potential threats, as well as leveraging technology for information gathering. The discussion highlights the importance of collaboration between the military, local government, and relevant agencies in effectively responding to threats, as well as the role of TNI AD programs in enhancing community welfare. The conclusion of this study recommends the establishment of DESK PAPUA within the National Intelligence Agency (BIN) to address local issues, and emphasizes the need for a Smart Power approach to mitigate separatist impacts. Additional suggestions include the formation of a special agency to handle conflicts in Papua and the expansion of the Manunggal Air Program to remote areas to support sustainable development.

### PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi ancaman serius terorisme, khususnya di Papua, di mana kelompok bersenjata seperti KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) terlibat dalam berbagai aksi teror, termasuk serangan, penyanderaan, dan pembunuhan, dengan motivasi politik yang jelas. Insiden-insiden teror yang terjadi, seperti penyanderaan di Camp Kimberly dan serangan di Bandara Kenyam, menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang signifikan di wilayah tersebut (Harianja, 2020). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB berdampak merugikan bagi masyarakat serta aparat keamanan, meskipun TNI berusaha mengatasi situasi tersebut melalui pendekatan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Antara, 2024).

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah Indonesia menyadari perlunya mengadopsi strategi intelijen militer yang kokoh. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan komitmen pemerintah untuk melawan terorisme dan mengatasi akar penyebab kekerasan di Papua. Intelijen militer memegang peran penting dalam menilai ancaman, mengumpulkan informasi, dan merumuskan respons yang efektif terhadap aktivitas kelompok bersenjata.

Lebih lanjut, terdapat dugaan keterlibatan intelijen asing dalam konflik di Papua, yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional dan mengancam kedaulatan negara (Viva.co.id, 2023). Dalam hal ini, legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya memperkuat fungsi intelijen serta menerapkan pendekatan humanis dalam penanganan masalah keamanan di

Papua, dengan harapan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Media Indonesia, 2021). Oleh karena itu, pendekatan ideal terhadap KKB/KKSB seharusnya melibatkan pengakuan bahwa aksi mereka merupakan bentuk terorisme yang harus ditangani melalui Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, disertai dengan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengakui hak-hak masyarakat lokal (Susetyo, 2021). Dengan demikian, penanganan masalah ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas di Papua. Kajian yang dilakukan oleh Lemhannas RI bertujuan untuk menemukan solusi baru yang dapat memenangkan hati rakyat Papua demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Lemhannas.go.id, 2023).

Secara keseluruhan, penanganan ancaman terorisme di Papua memerlukan pendekatan multifaset yang menggabungkan kekuatan intelijen militer dan respons hukum dengan upaya pengembangan sosial yang berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antar lembaga serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan dapat terwujud, sehingga memberikan peluang bagi perdamaian yang abadi di Papua. Kebijakan yang komprehensif dan inklusif akan sangat penting dalam menjaga integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika keamanan yang kompleks.

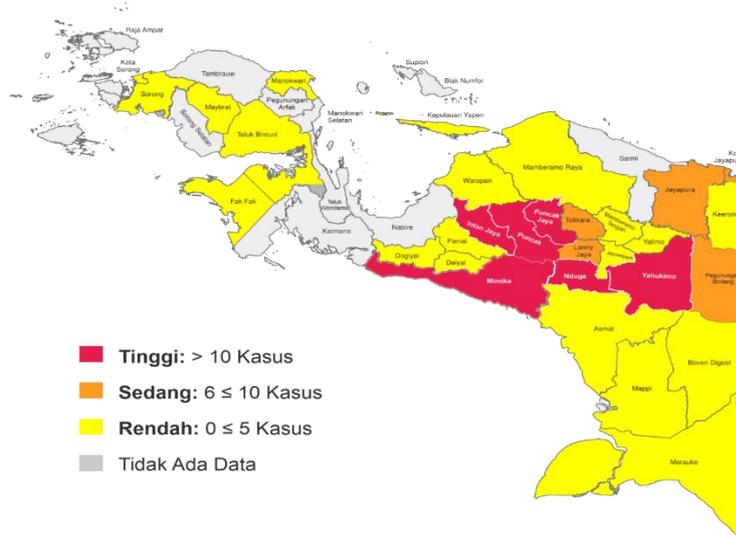
## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang dilaksanakan dalam kondisi alamiah, sesuai dengan panduan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, di mana interaksi langsung dilakukan dengan perangkat atau pejabat di Tentara Nasional Indonesia serta lembaga terkait lainnya selama kurun waktu tertentu. Dalam proses ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi yang mendalam dan relevan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel independen tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Anggara, 2015). Dengan demikian, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Strategi intelijen militer di Papua berfokus pada penerapan metode analitis dan operasional untuk mendeteksi serta menangani potensi ancaman. Hal ini mencakup pemetaan menyeluruh terhadap area rawan dan identifikasi aktor-aktor yang mungkin terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan teknik intelijen, strategi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan, serta mengembangkan taktik yang efektif untuk menghadapi berbagai situasi keamanan. Pendekatan ini memungkinkan Angkatan Darat merancang strategi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ancaman yang ada di lapangan.



**Gambar 1** Peta Tindak Kekerasan Per Kabupaten (Januari 2010- Maret 2020)

Sumber: [gtpapua.wg.ugm.ac.id](http://gtpapua.wg.ugm.ac.id) (2022)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa eskalasi tindak kekerasan yang berkelanjutan di Papua telah menunjukkan dampak yang signifikan, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Maybrat dalam tiga tahun terakhir.

Fenomena ini menggarisbawahi tantangan signifikan dalam menjaga keamanan di Papua. Pentingnya upaya untuk membangun perdamaian di wilayah ini mendesak, bukan hanya untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal tetapi juga sebagai prasyarat esensial bagi pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang inklusif sebagai manifestasi kehadiran negara yang bertanggung jawab terhadap warganya.

Peran intelijen dalam menghadapi ancaman keamanan di Papua sangat krusial, karena intelijen menyediakan informasi vital untuk perencanaan dan pelaksanaan operasi militer. Fungsi intelijen meliputi pemantauan dan analisis potensi ancaman dari berbagai sumber, termasuk kelompok separatis dan jaringan teroris. Melalui analisis mendalam, intelijen memungkinkan Angkatan Darat untuk mengantisipasi serangan, mengidentifikasi pola ancaman, dan merespons secara proaktif. Peran ini juga mencakup penggalangan informasi strategis yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi keamanan yang lebih efektif.

Implementasi kebijakan pertahanan negara di Papua melibatkan penerapan strategi intelijen militer yang dirancang untuk menghadapi ancaman spesifik di wilayah tersebut. Kebijakan ini menekankan pentingnya deteksi dini, respons cepat, dan koordinasi antara berbagai lembaga dan unit. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara intelijen, operasi lapangan, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Forkopimda dan lembaga pemerintah lokal. Dengan mengikuti pedoman kebijakan yang jelas dan terukur, Angkatan Darat dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan.

Ancaman keamanan di Papua bersifat beragam, mencakup konflik etnis, kegiatan separatis, hingga potensi terorisme. Identifikasi dan penilaian terhadap ancaman ini memerlukan pendekatan intelijen yang menyeluruh dan berkesinambungan, mengingat dinamika dan kompleksitas situasi di lapangan. Ancaman ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas regional. Oleh karena itu, strategi intelijen harus dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman dan menyesuaikan respons dengan kondisi yang terus berubah di wilayah tersebut.

Kerja sama antara Angkatan Darat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam merespons ancaman keamanan di Papua. Kerja sama antar lembaga ini memastikan bahwa informasi intelijen dapat disebarluaskan secara efektif, dan tindakan yang diambil didukung oleh semua pihak terkait. Dengan membangun jaringan komunikasi yang kuat dan integrasi antara berbagai aktor, kerja sama ini memperkuat kemampuan untuk merespons ancaman secara komprehensif dan menyeluruh.

### **Pembahasan**

Dalam merespons ancaman keamanan di Papua, peran intelijen militer Indonesia menjadi sangat penting. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi konflik bersenjata dan penyelundupan senjata, yang dapat memperkuat posisi kelompok separatis. Keberadaan intelijen yang efektif mampu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat, sehingga dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merespons ancaman secara tepat waktu, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

Pada 10 Maret 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perubahan ini tidak hanya mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kelompok yang berpotensi merusak stabilitas, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas intelijen militer dalam melaksanakan tugas mereka. Meskipun ada peningkatan jumlah militer di Papua, insiden seperti pembakaran fasilitas publik masih menunjukkan adanya celah dalam strategi pengamanan yang perlu ditangani secara lebih serius.

Strategi intelijen militer seharusnya mencakup pemetaan potensi ancaman dan deteksi dini terhadap kemungkinan risiko yang muncul. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan dan analisis yang mendalam, yang kemudian digunakan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani ancaman. Keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara pihak militer dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas.

Sebagai langkah proaktif, disarankan untuk membentuk DESK PAPUA di Badan Intelijen Negara (BIN) guna meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu lokal. Pembentukan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan melibatkan sumber daya lokal dalam penyelesaian konflik. Dengan strategi intelijen yang terintegrasi dan responsif, diharapkan keamanan jangka panjang di Papua dapat terjamin, sekaligus mendukung penerapan konsep Smart Power secara efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Selain itu, program unggulan TNI Angkatan Darat (AD) di Papua telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif ketahanan pangan dan penyediaan air bersih. Dengan memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan persawahan dan perkebunan, serta membangun infrastruktur air, TNI AD berkontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya akses air bersih, sementara Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, melaporkan pembangunan sembilan titik sumber air yang melayani masyarakat di dua wilayah. Dengan komitmen ini, TNI AD tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terpencil, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.

Dalam menghadapi ancaman keamanan di Papua, peran intelijen militer Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah, termasuk perubahan nomenklatur KKB menjadi OPM, mencerminkan keseriusan dalam menangani tantangan ini. Meskipun terdapat peningkatan jumlah personel militer, masih ada celah dalam strategi pengamanan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis informasi.

Strategi intelijen yang terintegrasi, termasuk pemetaan potensi ancaman dan deteksi dini, sangat penting untuk merespons risiko secara efektif. Keterlibatan Forkopimda dalam pengambilan keputusan juga akan memperkuat kolaborasi antara militer dan pemerintah daerah. Pembentukan

DESK PAPUA di Badan Intelijen Negara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu lokal, memanfaatkan sumber daya lokal, dan memastikan keamanan jangka panjang di wilayah ini. Di sisi lain, program-program unggulan TNI AD, seperti ketahanan pangan dan penyediaan air bersih, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan membangun infrastruktur dan memanfaatkan lahan tidur, TNI AD berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sinergi antara strategi intelijen dan program kesejahteraan ini akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera di Papua.

## PENUTUP

Dalam menghadapi ancaman keamanan di Papua, peran intelijen militer Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah, termasuk perubahan nomenklatur KKB menjadi OPM, mencerminkan keseriusan dalam menangani tantangan ini. Meskipun terdapat peningkatan jumlah personel militer, masih ada celah dalam strategi pengamanan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis informasi. Oleh karena itu, disarankan untuk membentuk DESK PAPUA di Badan Intelijen Negara (BIN) guna meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu lokal. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pihak militer dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk memastikan strategi yang terintegrasi dan responsif, sehingga dapat merespons ancaman dengan lebih efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam merespon ancaman keamanan di Papua perlu pengembangan baru yakni dengan menerapkan Smart Power sebagai upaya meminimalisir dampak gerakan separatis KKB. Selain itu, pemerintah harus konsisten dalam upaya pemerataan pembangunan di Papua sehingga taraf kehidupan yang layak juga dirasakan oleh OAP (Orang Asli Papua). Selain itu, TNI AD mendorong pemerintah untuk membuat suatu lembaga/kementerian dimana lembaga ini fokus menangani permasalahan konflik seperti di Papua dan wilayah lain, mengingat adanya kendala dalam proses koordinasi dan adanya ego sektoral dalam mengambil keputusan. Hal ini dilakukan agar dalam mengambil keputusan tidak berlarut-larut sehingga terciptanya efektifitas dan efesien dalam mengambil keputusan terhadap suatu konflik. Kemudian untuk Program Manunggal Air yang telah dilaksanakan oleh TNI AD yakni Program Air Besar untuk tetap dilakukan dan jika bisa diperluas hingga daerah terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2024). Panglima TNI jelaskan KKB di Papua kembali disebut OPM. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4053936/panglima-tni-jelaskan-kkb-di-papua-kembali-disebut-opm>
- Aly, Abdullah. 2011. Pendidikan Multikultural Di Pesantren (telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayunita Harianja, Manajer Departemen Kemanusiaan dan Perdamaian PSKP. Pusat Studi Kemanusiaan dan Madya, S. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.
- Adriana, I. (2016). Pengaruh efikasi diri dan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, 539-548. Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI.
- Fajriyah & Supardi. (2015). Penerapan strategi pembelajaran metakognitif terhadap hasil belajar matematika. In Leonard (Editor). *EduResearch: Raise The Standard*, Vol. 1, 1-24. Jakarta: Unindra Press.
- Lemhannas.go.id. (2023). Lemhannas RI Selenggarakan FGD Kajian Urgent dan Cepat Memutus Jaringan Sayap Militer Kelompok Teroris Papua. Diakses melalui <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1875-lemhannas-ri>
- Mursidi, Agus. 2015. Wacana Kuasa dan Hegemoni: Kiai Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kolaborasi

- dengan Pondok Pesantren. Jurnal Vidya Samhita. Vol. I. no 1  
<http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs/article/view/3>  
selenggarakan-fgd-kajian-urgent-dan-cepat-memutus-jaringan-sayap-militer-kelompok-teror-papua  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Leonard. (2013). Peran kemampuan berpikir lateral dan positif terhadap prestasi belajar evaluasi pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 32(1): 54-63. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v5i1.1259>
- Prahmana, R.C.I. (2012). *Pendesainan Pembelajaran Operasi Bilangan Menggunakan Permainan Tradisional Tepuk Bergambar untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar (SD)*. Unpublished Thesis. Palembang: Sriwijaya University
- Semua referensi yang dikutip dalam tubuh artikel wajib dituliskan dalam bagian daftar pustaka dan ditulis dalam 1 spasi secara alphabet, serta menggunakan standar bahasa internasional (bahasa Inggris) sekalipun teks yang dikutip berbahasa Indonesia. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka:
- Pemabangunan. Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua. Diakses melalui <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Media Indonesia. (2021). DPR Desak Fungsi Intelijen Diperkuat Di Papua. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/429908/dpr-desak-fungsi-intelijen-diperkuat-di-papua>
- Viva.co.id. (2023). Prabowo Mengungkap Keterlibatan Intelijen Asing dalam Kasus Rempang, Seperti yang Terjadi di Papua. Diakses melalui <https://padang.viva.co.id/ragam-perkara/2583-prabowo-mengungkap-keterlibatan-intelijen-asing-dalam-kasus-rempang-seperti-yang-terjadi-di-papua>
- Zulkardi. (2002). *Developing A Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers*. Published Dissertation. Enschede: University of Twente.